



TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI KOTA PEKANBARU (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AGIEL AL ASSYAFAR
NIM : 11327102668

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
RIAU Pekanbaru
1441 H /2020 M**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI KOTA PEKANBARU (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)”, yang ditulis oleh:

Nama : AGIEL AL ASSYAFAR
NIM : 11327102668
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HL., MH

Penguji II
Firdaus, SH., MA


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Hak Cipta dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

AGIEL AL ASSYAFAR (2019) : TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI PEKANBARU (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)

Skripsi ini membahas mengenai harga rekomendasi visa umrah di kota pekanbaru pada PT.RWH dan PT.Silver Silk dan mencoba menganalisis terkait rekomendasi harga visa umrah ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana rekomendasi visa tersebut mencantumkan harga visa umrah sebesar 77 USD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yuridis yaitu meneliti penerapan hukum di PT.RWH dan PT.Silver Silk. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptis analitis yaitu menjambarkan gambaran yang terjadi di lapangan lalu menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa hasil wawancara dengan Pimpinan dan Staff kantor PT.RWH dan PT.Silver Silk di kota pekanbaru, lalu bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ada di perpustakaan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pemerintah arab saudi sendiri tidak ada menetapkan berapa nominal harga visa umrah, dengan itu menjadikan kebijakan harga visa umrah ditentukan oleh masing-masing penyelenggara perjalan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah. Biaya harga yang dibebankan kepada jemaah, merupakan biaya pengurusan visa umrah yang terdapat unsur provit untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah. Sehingga pengurusan visa umrah adalah kegiatan bisnis yang perlu diatur dengan hukum persaingan usaha. Harga rekomendasi visa umrah yang dikeluarkan oleh asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, tidak terdapat unsur perjanjian karena HIMPUH sebagai asosiasi yang pernah mengeluarkan surat edaran bukanlah surat keputusan melainkan rekomendasi yang mana bisa di ikuti atau tidak masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Keyword : Persaingan Usaha, Harga Rekomendasi dan Visa Umrah

Pembimbing : Hellen Last Fitriani S.H,M.H



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahuwata`ala. Allah semesta alam yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI PEKANBARU (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)** ”

Sholawat beiring salam tak lupa kuhadiahkan kepada Rasul manusia termulia Nabi Muhammad sholallahualahi wasallam dengan mengucapkan *Allahumma sholli ala Muhammad, wa`ala ali Muhammad*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Strata Satu (1) Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang tersayang Ayahanda tercinta H.Yandri Aleska dan Ibunda tercinta Hj.Welly Darti yang tiada hentinya selalu berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya, yang selalu sabar dan ikhlas mendidik dan menyayangi ke semua anaknya. Dan Kepada Kakak Werry Nuryani, Kakak Widya Guswendri bersama suami dan juga Alesha nya Aman, Adik Windi Nabela Oktavia dan keluarga besar yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Teriring dan doa semoga ALLAH selalu melindungi, memberi kesehatan, dan diberikan keberkahan hidup dunia akhirat.



2. Bapak Prof Dr,KH Ahmad Mujahidin S.Ag M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim beserta para Wakil Rektor I ,II dan III

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim RIAU, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Bapak Dr.Wahidin, Sag.,M.Ag dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA

4. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU, beserta Sekretaris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

5. Ibuk Hellen Last Fitriani S.H,M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan yang luar biasa bagi penulis, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, ibuk begitu berjasa atas bimbingan dan bantuannya sehingga pembimbing bisa menyelesaikan tugas akhir pembimbing, sekali lagi penulis ucapkan Ajarakallahu fiima a'taiti wabarakallahu fiima abqaiti .

6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

7. Pimpinan Serta Jajaran dan juga Karyawan Kantor PT.RWH Pekanbaru dan PT.Silver Silk Pekanbaru, yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

8. Dan ucapan terima kasih kepada sahabat, Angga Permana, Hengki, Khairul Fikri, serta kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum 1 angkatan 2013, Hukum Bsinis 1 angkatan 2013, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

9. Kepada Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) RIAU periode 2015-2017-2019 yang banyak belajar bersama tentang Leadership dan juga akademik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Kepada teman-teman Pertukaran Pelajar Antar Negara (Exchange Student)

Indonesia - Thailand, Adun, Farid dan Ihsan yang juga bersama membawa budaya dan menghormat Indonesia ke kancah Internasional.

11. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Adinda Nurul Fikriyah S.Farm yang telah banyak memberikan do'a, dukungan, nasehat dan bantuannya kepada penulis hingga sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini Adinda selalu ada untuk semua, penulis ucapkan *Ajarakallahu fiima a'thoiti wabarakallahu fiima abqoiti wabarakallah wayassarallah warhamna ya Allah*.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya penelitian yang telah saya susun ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang membaca dan memahami karya ini dan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wata'ala. Aamiin...

Pekanbaru, 01 Desember 2019
Penulis

AGIEL AL-ASSYAFAR
NIM : 11327102668

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1.1 Profil PT Riau Wisata Hati (RWH).....	13
1.2 Profil PT. Silver Silk	20
1.3 Profil HIMPUH	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
1.1 Hukum Perjanjian Dalam Kegiatan Bisnis.....	32
1.2 Perjanjian yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
1.1 Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terkait Harga Visa.....	49
1.2 Pengurusan Visa Umrah di HIMPUH	70
1.3 Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terkait Harga Visa Umrah.....	73
BAB V PENUTUP	
1.1 Kesimpulan.....	84
1.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengambilan Sampel berdasarkan Populasi	12
---	----

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).

Korelasi antara hukum dan ekonomi demikian erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya, perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi.¹

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma

¹Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 45.



hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.²

Kegiatan bisnis dalam dunia ini sangat terkait dengan perilaku (behavior) pelaku usaha atau ekonomi di pasar. Perilaku pelaku usaha atau ekonomi yang selalu akan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sebuah watak pelaku usaha atau ekonomi sebagai manusia yang memiliki nafsu untuk mencari keuntungan semata. Berbeda dengan Islam, pelaku usaha dianjurkan dalam berbisnis adalah saling memberikan tolong-menolong dalam usahanya. Oleh sebab itu aturan persaingan usaha akan mengatur etika dalam berbisnis yang baik dan sehat demi terciptanya ekonomi yang baik dan menciptakan iklim pasar yang sehat.

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha antar pelaku usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Akibat positif dari persaingan usaha yang sehat bagi pengusaha yang saling bersaing dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen akan mendapatkan manfaat dari persaingan usaha ini, yaitu kualitas produk yang terjamin.

Dalam kaitan dengan meningkatnya aktifitas perdagangan Indonesia, memberikan fakta bahwa ekonomi di Indonesia adalah ekonomi pasar. Salah satu hukum ekonomi pasar adalah bahwa perekonomian akan berjalan baik kalau mengambil untuk sebanyak-banyaknya, atau untuk menang dalam persaingan dan sebagainya itu dapat dikendalikan oleh ketentuan-ketentuan yang adil dan

²Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.



objektif.³

Terkait dengan etika dalam berbisnis, dalam Islam dengan ini memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis. Etika bisnis mengatur hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Etika bisnis dalam Islam yaitu:⁴

1. Menolak monopoli dan terhindar dari usaha tidak sehat
2. Menolak eksploitasi
3. Menolak diskriminasi
4. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban

Kebijakan menegakkan persaingan yang wajar merupakan acuan pokok

bagi Undang-Undang tentang Anti Monopoli antara lain:

1. Menjamin persaingan di pasar yang inherent dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha perdagangan
2. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen
3. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada sekelompok masyarakat tertentu.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

³Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

⁴Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Kencana, 2014) h. 26.



Dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*”. Bentuk perjanjian yang dilarang dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah penetapan harga. Pengertian larangan penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.⁵

Suatu Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang efektif merupakan syarat mutlak bagi berjalannya ekonomi pasar. Undang-undang ini melarang perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan kekuasaan monopoli, dan fusi antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar. Dengan demikian, undang-undang tersebut menjamin akses ke pasar untuk semua pihak, serta kebebasan bagi setiap peserta pasar untuk mengambil keputusan secara bebas.⁶

Peraturan tentang hukum persaingan usaha dalam bentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan aturan main kepada para pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Terhadap praktik bisnis curang yang dilarang pada dasarnya sangat luas ruang lingkup dari praktik-praktik bisnis yang menurut hukum persaingan dinyatakan sebagai praktik bisnis yang curang,

⁵Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2014) Cet. Ke-4, h. 156.

⁶Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, h. 16



praktik bisnis curang meliputi:⁷

1. Perbuatan hukum berupa perjanjian atau kontrak baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha dikarenakan posisi dominannya dalam pasar produk barang dan/atau jasa.

Indonesia sebuah negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, menjadikan para pelaku usaha tertarik untuk mendirikan perusahaan atau badan usaha dalam bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah merupakan sebuah badan hukum dan badan usaha yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang mencari provit dari kegiatan usaha. Perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah harus terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Direktorat Jenderal Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Untuk perjalanan umrah ke kota Makkah, para jamaah diwajibkan mempunyai visa, yaitu visa umrah yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Dalam penerbitannya, visa umrah dapat diurus melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar di Kementerian Agama sebagai provider visa umrah. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang

⁷Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, h. 63.



terdaftar sebagai provider visa umrah merupakan biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang telah memenuhi syarat sebagai provider visa umrah. Pada tahun 2017 penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa sebanyak 173 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Sistem pengurusan visa umrah melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah, menurut peneliti akan mengakibatkan dan membuka peluang bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah melakukan kegiatan monopoli dan persiapan usaha tidak sehat dengan adanya perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis mengenai penetapan harga baik dengan sesama provider visa atau dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah dan atau yang belum terdaftar.

Dari sebagian penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah di Indonesia adalah termasuk dalam anggota Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). Himpunan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji merupakan sebuah asosiasi dari berbagai penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang melayani, membimbing dan mengadvokasi anggotanya.

Salah satu pelaku usaha biro jasa perjalanan haji dan umroh adalah PT. Riau Wisata Hati (RWH) yang beralamat di jl. Soekarno hatta no 555 E&F- Pekanbaru. PT. RWH merupakan sebuah perusahaan biro perjalanan haji dan umroh yang terbilang sudah cukup lama berkiprah, pengguna jasa biro perjalanan ini kebanyakan didominasi oleh masyarakat kalangan atas, seperti pejabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah, anggota legislatif, aparatur sipil negara dan lainnya.

Kita lihat pada spanduk dan brosur yang disebar oleh PT RWH harga/biaya perjalanan memang relatif tinggi mengingat fasilitas-fasilitas yang di tawarkan sangat baik, seperti hotel mewah, dekat dengan masjidil haram, jumlah satuan orang per kamar dan fasilitas-fasilitas menarik lainnya. tentunya dengan biaya-biaya yang relatif tinggi pengguna jasa mesti menyediakan budget yang lebih tinggi untuk menggunakan jasa travel ini.

Berbeda dengan pesaingnya PT. Silver silk, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel haji dan umroh. PT silver silk di dirikan oleh bapak H. Fitriyadi, SE yang beralamat di jl. Kaharudin Nasution no 77 simpang tiga, Pekanbaru, didirikan pada tahun tanggal 12 januari 2001, Pengguna Jasa biro perjalanan haji dan umroh pt. silver silk kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah kebawah, seperti pedagang, petani, dan lainnya. Mengingat harga yang ditawarkan untuk keberangkatan haji dan umroh relatif lebih murah.

Hal ini menjadi sebuah fakta menarik bagi kami selaku peneliti, mengingat bagaimana pemerintah khususnya badan imigrasi dalam menetapkan rekomendasi biaya visa, karena dengan begitu besaran biaya visa mempengaruhi terhadap besaran biaya perjalanan keberangkatan haji dan umroh.

Terkait dengan harga rekomendasi visa haji plus dan umrah yang pernah Maka dari latar belakang masalah tersebut, dengan ini peneliti sangat tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI PEKANBARU (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu terkait kebijakan harga rekomendasi visa haji plus dan umrah yang merupakan biaya pengelolaan visa haji plus dan umrah ditinjau sebagai perjanjian yang mengakibatkan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum persaingan usaha terkait harga visa haji dan visa umrah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana persaingan usaha terhadap harga visa haji dan umroh di PT.RWH dan PT. Silver Silk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tinjauan hukum persaingan usaha terkait harga rekomendasi visa haji plus dan umrah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha terhadap harga rekomendasi visa haji dan umroh di PT.RWH dan Silver Silk.

2. Manfaat Penelitian

- a. Terkhusus bagi peneliti untuk bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum bisnis.
- c. Dapat membantu pemerintah dalam hal pembuatan regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah.
- d. Dapat dielaborasi keilmuan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
- e. Dapat dijadikan kajian lebih mendalam oleh praktisi hukum, pengamat dan mahasiswa ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang difokuskan pada harga rekomendasi visa umrah. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengumpulan Data

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), Cet. III, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengumpulan data, sumber data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder⁹.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yakni, data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji yaitu PT. Riau Wisata Hati dan PT. Silver Silk. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian lapangan (field research) yaitu, suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung melakukan ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas (obyektif). Adapun instrument pengumpulan data tersebut adalah:

- 1) Wawancara, yaitu melakukan interview kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi untuk penelitian ini, dalam hal ini yaitu pimpinan/karyawan/staff dari PT. Riau Wisata Hati dan PT. Silver Silk.
- 2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data di lapangan yang dilakukan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada di lokasi penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan¹⁰. Data yang diambil dari pustaka yang dapat

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2008), h. 141.

¹⁰ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang data primer dengan menggunakan metode (library research) yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.

3. Analisa Data

Dalam penganalisaan data menggunakan data deskriptif analisis yaitu teknik analisa di mana Peneliti menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisa dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang didapat dari perpustakaan.

4. Populasi dan Sample

Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan¹¹.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak aparaturnya kantor imigrasi provinsi riau yang berwenang terhadap pengurusan visa sebanyak 10 orang, karyawan/staf PT. Riau Wisata Hati (RWH) sebanyak 20 orang dan karyawan/Staf PT. Silver Silk sebanyak 24 orang.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

2005), Cet. XXI, h. 6

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 90-91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan sampel yaitu Teknik Insidental sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan orang yang kebetulan dijumpai saat melakukan observasi. dan teknik Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, karyawan/staf PT. Riau Wisata Hati (RWH) sebanyak 6 orang dan karyawan/Staf PT. Silver Silk sebanyak 4 orang.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pengambilan Sampel berdasarkan Populasi

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Karyawan/Staf PT. RWH Pekanbaru	14	14	
2	Karyawan/Staf PT. Silver Silk Pekanbaru	20	20	
Jumlah				

Sumber Data : Data Olahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil PT Riau Wisata Hati (RWH) ¹²

PT. Riau Wisata Hati (RWH) merupakan biro perjalanan ibadah umrah yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama Republik Indonesia dengan No. 167 Tahun 2016. Travel ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat Tanah Air dengan banyaknya jamaah yang mendaftar. Terbukti, hingga saat ini sudah puluhan ribu jamaah umrah berangkat bareng RWH.

Badan hukum PT. Riau Wisata Hati dengan Nomor Sk: Nomor 167 Tahun 2016 Tanggal Sk : 26-04-2016, Nama Direktur : Dewi Sri Rejeki, Alamat Kantor: Jl.Hangtuah No. 172, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, 38, Telp. (0761) 849588-853288, Fax. (0761) 853167, Email: Info@Wisatahati.Co.Id

PT. Riau Wisata Hati sendiri memiliki beberapa cabang di dalam kota juga d luar kota bahkan Provinsi. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri ada 5 cabang :

1. RWH Soeta Riau Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta No. 555 E&F, Marpoyan Damai 082177755555
2. RWH Hangtuah Riau Hangtuah Jalan Hangtuah No.172 B 082277755555
3. RWH Rajawali Riau Rajawali Jalan Rajawali No. 42 A 082277755555
4. Dawood Travel RIAU Hangtuah Ujung JL.Utama, Hangtuah Ujung D'Calista Pekanbaru 082388655555
5. RWH Sudirman RIAU PEKANBARU JL. SUDIRMAN 081298855555



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan beberapa kantor lainnya:

1. RWH Tembilahan Indragiri Hilir Riau Jl. Soebrantas No. 55 (Samping Kantor Gerindra) 081293155555
2. RWH Bangkinang Kampar Riau Jl. Prof.M.Yamin, SH depan Bank Riau Kepri 082257755555
3. RWH Pasir Pangaraian Rokan Hulu Riau Jl. Tuanku Tambusai Pematang berangan 082168055555
4. RWH Padang Sumatera Barat 082388855555
5. RWH SUMUT Sumatera Utara Medan Jl. Karya Jaya BO 214 MEDAN JOHOR – MEDAN 082299255555

B. Visi dan Misi PT. Riau Wisata Hati (RWH)

a. Visi

Menjadi penyelenggara haji dan umrah terbaik di Indonesia yang memfokuskan kepada kepuasan setiap jamaah dalam beribadah dengan motto “Bukan Jalan-Jalan Biasa”.

b. Misi

1. Menyelenggarakan perjalanan ibadah Haji dan Umrah dengan kualitas layanan prima untuk mencapai kemabruran ibadah.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan menjunjung tinggi nilai nilai ibadah.
3. Meningkatkan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan agar menjadi perusahaan jasa Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah yang terbaik di Indonesia



C. Struktur PT. Riau Wisata Hati

1. Komisaris : Muhammad Dawood
2. Direktur Utama : Dewi Sri Rejeki
3. Pembina : Ustad Mustafa Umar
4. Manager : Rina Mariyanti
5. Staff Umrah
 - Laily fitriani
 - Eli Wardani
 - Rahayu suprianti
6. Staff ADM
 - Syahriani Siregar
 - Elki Ali Yahfi
 - Rahmi Hidayati
 - Anggi Marlinda
7. Ticketing
 - Syovia Mahardiana
8. Accounting
 - Ayu Syilfia Monica
9. Bagian Lapangan/Leadear
 - Dedi Irawan
 - Jhon Susana
 - Fadli
 - Saiful Rizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Niko Purwanto
- Rido Al Fatra
- Solehan
- Roni Multifiarido

10. Customer Service

- Sartika
- Nurita Rahmi
- Mey Rani Sipayung
- Runni
- Ayu Gustina
- Hana Reflisa

11. Visa

- Ayu Sekarini
- Aziz Achmad

12. Logistik

- Tahmad Zulrazi

13. Security

- Ali Mahrus

D. Rincian Tugas dan Tanggungjawab

Adapun uraian tugas dan jabatan dari masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi di PT. Riau Wisata Hati adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komisaris

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional Kantor selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan guna memastikan pencapaian target Cabang dan wilayah secara optimal, sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

2. Direktur Utama

Mewakili PT atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain, mengurus dan mengelola PT untuk kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

3. Pembina

Penasehat ibadah umrah, memberikan bimbingan manasik umrah.

4. Manager

Mengawasi dan meriview laporan akuntansi dan system yang terkait untuk kesempurnaan, membuat dan mengkoordinasikan pelaksanaan.

5. Staff Umrah

Membuat *schedule* umrah.

6. Staff Administrasi

Mengerjakan administrasi perusahaan, surat menyurat, penerimaan pendaftaran jamaah, menjawab telepon dan menyambungkan dengan staf yang memerlukannya, mengatur dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkoordinasikan pertemuan, membuat program perjalanan umrah (*Itinerary*).

7. Ticketing

Divisi ini bertugas dalam ruang lingkup dalam reservasi atau pemesanan tiket pesawat yang dikehendaki oleh konsumen yang akan melakukan perjalanan umrah.

8. Accounting

Menginput data jamaah dan menginput kas keluar masuk Riau Wisata Hati.

9. Bagian Lapangan/Leadear

Mengurus keberangkatan dan kepulangan para jamaah umrah dibandara maupun diluar daerah dan mendampingi keberangkatan group umrah.

10. Customer Service

Memberikan pelayanan kepada tamu maupun calon jamaah umrah sesuai kebutuhan (seperti pelayanan penjelasan paket umrah, dokumen yang perlu disiapkan jamaah, dll), menangani keluhan tamu atau jamaah umrah sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan.

11. Visa

Mengurus stamp visa umrah jamaah.

12. Logistik

Pengambilan data penerimaan barang, melakukan tugas administrasi (termasuk dokumen pendistribusian/collection/filling),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompilasi laporan ketidaksesuaian dan ekspirmasikan penutupan dari perbedaan produk, perbarui dan kompilasi laporan bulanan terkait logistic, memelihara persediaan barang.

13. Securyti

Menjaga keamanan kantor (menjaga suatu asset, instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat dan melakukan pemantauan peralatan, pengawasan pemeriksaan dan jalur akses, untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja.) melakukan tindakan preventif keamanan.

CEO RWH, Muhammad Daud mengatakan, sejak berdiri RWH memiliki komitmen yang akan terus dijaga, yakni memberi kejujuran, kenyamanan dan komitmen terhadap jamaah untuk melayani dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab terhadap jamaah. Saat peneliti melakukan observasi ke kantor beliau mengatakan “Alhamdulillah, dengan niat yang ikhlas, jujur dan apa adanya mengenai layanan kami yang kami sampaikan kepada jamaah, kita mendapatkan kepercayaan dari jamaah” kata bapak daud selaku CEO PT RWH.

Pada musim umrah tahun ini, RWH membuka beragam jenis paket umrah yang dibanderol mulai Rp 21 juta selama 11 hari. Selain itu, ada juga paket 14 hari yang dibanderol seharga Rp 23 juta dan juga ada paket favorit dan paling laris yaitu paket perjalanan umrah selama 25 hari yang dibanderol Rp 30 juta. Selain itu, RWH juga menyediakan beberapa paket umrah seperti, Umrah Andalan seharga Rp 26 juta, Umrah VIP seharga Rp



33 juta, Umrah Medium seharga Rp 30 juta dan Umrah Platinum seharga Rp 40 juta.

Selain paket umrah, RWH juga membidik pasar wisata muslim. Menurut Daud, wisata muslim mempunyai prospek yang bagus karena permintaan masyarakat juga semakin meningkat seiring banyaknya minat umat muslim untuk mengunjungi situs-situs bersejarah. Paket wisata muslim meliputi, Cina, Malaysia, Thailand, dan lainnya.

E. Profil PT. Silver Silk

PT. Silver Silk Tour & Travel didirikan pada tanggal 12 Januari 2001 di Pekanbaru. PT. Silver Silk Tour & Travel berlokasi di Jl. Kaharuddin Nasution No.77 Simpang Tiga Pekanbaru, dengan Sk Kementerian Agama RI (Umroh): No. D/474 Tahun 2012. PT. Silver Silk Tour & Travel merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Tour & Travel yang memfokuskan diri dalam bidang penyelenggaraan pelayanan ibadah Haji dan Umrah, serta paket perjalanan lainnya. Walaupun lingkup kegiatan usaha PT. Silver Silk Tour & Travel menjual dan menyelenggarakan paket bimbingan Umrah dan Haji plus, PT. Silver Silk Tour & Travel sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan ibadah Haji dan Umrah mempunyai motto “ solusi tepat untuk kualitas ibadah anda”.

PT. Silver Silk Sendiri memiliki beberapa cabang di beberapa daerah bahkan diluar Provinsi sebagai berikut :

a. Tembilahan

Jl. Telaga biru parit 11 no. 13 Hp/wa : 0811 7043 900 / 0812 6733

8880

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Email : silversilk_tembilahan@yahoo.com

- b. Bengkalis

Jl. HR. Soebrantas wonosari timur Hp/wa : 0811 7044 222

Email : silversilkbengkalis@yahoo.com

- c. Bangkinang

Jl. Jend. Sudirman no. 30 Bangkinang, Kab Kampar (depan

SMA 1 Bangkinang) Hp/wa : 0811 7044 800 / 0812 6153 1994

Email : silversilkbangkinang@yahoo.co.id

- d. Rokan hulu

Jl. Tuanku Tambusai komplek ruko al hamra blok b no. 7 Pasir

putih Hp/wa: 0811 7044 949 / 0813 7011 8777

Email : silversilk_rohul@yahoo.com

- e. Duri

Jl. Sudirman no.2 simpang Gerageh Desa Balai Makam Hp/wa :

0811 7044 344 / 0812 6153 1990 / 0812 6153 1991

Email : silversilkduri@yahoo.co.id

- f. Batam

Jl. Gajah mada ruko tiban mas blok A no.31 Batam wa : 0811

7046 161/ 0813 7011 9111 Hp : 0811 7044 455 / 0812 6821 2277

Email : silversilk_batam@yahoo.co.id

- g. Medan

Jl. Brigjend Katamso 445 Medan Sumatera Utara Hp/wa : 0811

7044 554 / 08222 7636 3993 / 0822 8369 3932

Email : silversilk_medan@yahoo.com



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bukit tinggi

Jl. By pass Aur Kuning (200 m dari pasar aur kuning arah padang) Hp/wa : 0811 7044 488 / 0822 8369 3925 / 0822 8369 3926 / 0878 9426 3203

Email : silversilk_bukittinggi@yahoo.com

i. Padang

Jl. S. Parman No.130A Lolong-Padang Hp/wa: 08117044343/08194776 2000

Email : silversilk_padang@yahoo.com

j. Jambi

Jl. DI. Pandjaitan no. 47 Simpang puncak kec. Jelutung Jambi Hp/wa : 0811 7044 044 / 0822 8369 3927 / 0822 8369 3928

Email : silversilk_jambi@yahoo.com

k. Jakarta

Jl. Salak no. 59 RT. 002 RW.012 Kel. Cawang, Kec. Kramat Djati, Jakarta timur Hp/wa : 0811 7044 1111

Email : jkt.silversilk @gmail.com

F. Visi dan Misi PT. Silver Silk

a. Visi

Visi dari PT. Silver Silk Tour & Travel adalah “memjadi perusahaan penyelenggara Haji dan Umrah yang terpercaya”.

b. Misi

Misi PT. Silver Silk Tour & Travel adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peroduk Haji dan Umrah yang variatif dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas untuk kepuasan bagi setiap jamaah.

2. Peningkatan kepercayaan jamaah dengan peningkatan kecepatan layanan dan hubungan berdasarkan kekeluargaan.
3. Pengembangan kantor perwakilan di banyak daerah.
4. Memberikan keuntungan *Share Holder*, manajemen dan karyawan.

Office : Jl. Kaharuddin Nasution No. 77 Simpang Tiga Pekanbaru

Telp : (0761) 679192

Fax : (0761) 679793

Hotline : 0811755764

E-Mail : silversilktour@yahoo.com

Jam kerja oprasional:

- a. Senin-Jumat : 08.00-20.00 WIB
- b. Sabtu : 08.00-16.00 WIB
- c. Minggu : 08.00-16.00 WIB

G. Struktur PT. Silver Silk

Komisaris : Novrina

Direktur : Fitriyadi, SE

Manajer : Much Chozin Sofyan

Kasir

- Vera Waty, Amd
- Permadi Putra Domo

CSO Haji

- Ika Pratiwi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Reffi Sartika
- Verissya Oktarika

CSO Umrah

- Sri Wahyuni
- Ratih Wulandari
- Afriyenti

Dokumen

- Siti Aisyah
- Desy. A

CSO Tour

- Febri Yanti
- Delly Yari Syahfitri

CSO Tiketing : Rissutari

Lapangan

- Yudha Mandana Pratama
- Putra
- Masnur
- Heppi Candra

H. Rincian Tugas dan Tanggungjawab

Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi PT. Silver Silk Tour & Travel adalah:

1. Direktur

- Menetapkan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai dalam periode tertentu.

- b. Mengesahkan rencana kerja perusahaan dalam periode tertentu.
- c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja secara keseluruhan.
- d. Mewakili badan usaha diluar perusahaan.
- e. Mengurus dan menangani kekayaan perusahaan.

2. General Menejer

- a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dirktur.
- b. Bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran perusahaan.
- c. Menandatangani surat-surat yang bersifat prinsipil.
- d. Membuat program kerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- e. Menjaga nama baik perusahaan.
- f. Bertanggung jawab dan memberikan laporan tahunan mengenai laba dan rugi kepada direktur.

3. Keuangan

- a. Menangani keuangan perusahaan.
- b. Mengatur pembukuan perusahaan.
- c. Bekerjasama dengan para menejer diperusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefesien mungkin.

4. Haji dan Umrah

- a. Menguasai dengan baik informasi mengenai produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan memberikan informasi selengkap-lengkapanya kepada pelanggan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pelayanan Haji dan Umrah kepada pelanggan.
 - c. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata Haji dan Umrah dan mengurus dokumen-dokumen perjalanan untuk keperluan Haji dan Umrah.
 - d. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Haji dan Umrah, seperti mengecek kuota haji yang diberikan dari Departemen Agama.
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku dalam perusahaan.
5. Dokumen
- a. Mendata semua kelengkapan dokumen konsumen.
 - b. Menyimpan semua arsip dokumen konsumen.
 - c. Menjaga dengan baik semua kelengkapan konsumen.
 - d. Membuat daftar kelengkapan dokumen konsumen.
 - e. Bertanggung jawab atas semua kelengkapan dokumen konsumen.
6. *Ticketing dan Tour*
- a. Menguasai dengan baik informasi mengenai produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada pelanggan.
 - b. Melakukan penjualan paket-paket Tour.
 - c. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan tiket, seperti mengecek status ketersediaan tiket maskapai yang dibutuhkan untuk perjalanan.
 - d. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusan jadwal perjalanan konsumen, jumlah peserta, serta mengecek status ketersediaan kamar hotel yang dituju oleh pelanggan.

- e. Melakukan pemesanan tiket terhadap maskapai penerbangan yang dilakukan oleh pelanggan.
- f. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku dalam perusahaan.

7. Lapangan

- a. Bertanggungjawab terhadap pengaturan dan mengarahkan jamaah.
- b. Menyebarkan kalender dan brosur.
- c. Membawa dan mengurus perlengkapan jamaah.
- d. Mengantar perlengkapan kesetiap kantor cabang.

I. Profil HIMPUH

HIMPUH adalah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, saat ini beranggotakan 313 tarvel agen penyelenggara Umrah dan Haji Khusus dari seluruh Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2009 melalui Musyawarah Besar Luar Biasa di Kuningan Jawa-Barat, HIMPUH telah memandu dan membantu anggotanya melayani tidak kurang dari satu setengah juta jamaah umrah dan lebih dari 60.000 jamaah haji khusus.

HIMPUH adalah suatu wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Adapun susunan kepengurusan HIMPUH yaitu dewan pengurus, dewan kehormatan dan dewan penasihat. Dewan pengurus menjalankan amanat dari musyawarah besar yang setiap empat tahun sekali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga tugas dan wewenang HIMPUH yaitu pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Para anggota HIMPUH yang saat ini terdaftar aktif berjumlah 308 anggota dari keseluruhannya 340 anggota yang tercatat, maka sesuai dengan tugas dan wewenangnya HIMPUH maka para anggota HIMPUH akan menerima pembinaan, pelayanan dan advokasi. Misalnya apabila ada anggota yang melanggar lalu disomasi atau diadukan. Maka asosiasi akan melihat dan mengkaji terlebih apakah anggota tersebut sebagai korban atau pelaku.

J. Struktur HIMPUH

Ketua Dewan Penasehat

- H.Rustam Sumarna

Dewan Penasehat

- H.M.Rum Mashur
- H.M.Hadidz
- H.Herman Barata

Ketua Dewan Kehormatan

- H.Eddy Setiawan

Dewan Kehormatan

- H.Djadjang Sudrajat
- H.Andi Aminuddin
- H.Hadjib Salim

Ketua Umum

- H.Baluki Ahmad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wakabag Dalam Negeri

- H.Budi Darmawan

Wakabag Luar Negeri

- H.Ali Moh Amin

Wakabag Humas & kelembagaan

- H.Muharom Ahmad

Bendahara Umum

- H.Boyke P Abidin

Sekretaris Jendral

- H.Anton Subekti

Wasekjen Bagian Dalam Negeri

- H.M Firman Taufik

Wasekjen Bagian Luar Negeri

- H.Muh Ja'far M

Wasekjen Kesekretariatan

- H.Farid Hanifah

Ketua Bidang Haji

- H.M.A Wahyudi

Bidang Haji Luar Negeri

- H.Maman Abdurrahman

Bidang Haji Dalam Negeri

- H.Atik Mulyanto
- H.Ahmad Taufiq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ketua Bidang Umrah

- H.Juli fauza

Bidang Umrah

- H.Fahmi Alatas
- H.Nizar bin Zagar

Ketua Bidang Transport dan Akomodasi

- H.Rizka Ru'yat R

Bidang

- H.M Budi Santoso
- Hj. Wanda I.Backsin

Ketua Bidang Litbang & Diklat

- H.Prana Tanjudin

Bidang

- H. Abdul Kadir

Ketua Bidang Organisasi dan keanggotaan

- H.Achmad Syakir Chozy

Bidang

- H.M Komaruddin
- H.Muddasir

Ketua Bidang Sosial

- Hj. Ika Novianti

Bidang

- Hj. Djuraidah Mahmud



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan

- H. Budi Rianto

Bidang

- H. Moh Ramli

Ketua Bidang Wisata Muslim & Halal Tour

- Hj. Fatma Kartika Sari
- Hj.Sri Budi Tisnowati
- Hj.Anita Sari

UIN SUSKA RIAU



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Perjanjian Dalam Kegiatan Bisnis

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatandengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainatau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataanyang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan.¹³ Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan.

Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai hartabenda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggapberjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 1991), h. 1.

¹³Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) Cet. Ke-4h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.¹⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁵ Sedangkan Setiawan mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

Selain dari perjanjian, dikenal pula istilah perikatan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya doktrin berusaha merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.¹⁷

Pasal 1233 KUHPerdata dikatakan bahwa suatu perikatan ada yang lahir karena perjanjian dan ada yang dilahirkan karena undang-undang. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia tidak dikenal istilah hukum kontrak, hukum perdata mengenal istilah hukum perikatan dan/atau hukum perjanjian.¹⁸

¹⁴ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), h. 85.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 78

¹⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Putra Abardin, 1999), h. 49.

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 1.

¹⁸ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu teori dari hukum kontrak adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak.¹⁹

Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya.²⁰

2. Macam-Macam Perjanjian

1. Perjanjian Bersyarat

Pasal 1253 KUHPdata: Perikatan adalah bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara managguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perjanjian. Undang-undang menentukan syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a. Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan

¹⁹Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 39.

²⁰Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertentangan dengan kesusilaan
 - c. Dilarang undang-undang
 - d. Pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.
2. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu

Perjanjian dengan ketetapan waktu berbeda dengan perjanjian bersyarat melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Ketetapan waktu yang dapat menangguhkan atau mengakhiri perikatan.²¹

Dalam pasal 1270 KUHPdata waktu yang ditetapkan selalu ditentukan untuk kepentingan debitor, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau keadaan ternyata bahwa waktu itu ditentukan untuk kepentingan kreditor). Dengan demikian, bahwa perjanjian dengan ketetapan waktu dibuat untuk kepentingan dan keuntungan dari debitor. Pada prinsipnya dalam setiap perikatan yang sederhana, setiap kewajiban atau prestasi haruslah segera dilaksanakan oleh debitor begitu perjanjian tersebut dilahirkan.²²

3. Perjanjian Alternatif

Dalam pasal 1272 KUHPdata: dalam perikatan-perikatan masukan, debitor dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa

²¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni 2005), 14.

²²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreditor untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang lain.

Sifat perjanjian yang dapat memilih untuk melakukan salah satu dari kewajiban atau prestasi berikut di bawah ini:²³

- a. Menyerahkan salah satu dari dua atau lebih barang yang diperjanjikan untuk diserahkan menurut sifat perjanjian
- b. Melaksanakan penyerahan barang atau melakukan sesuatu perbuatan
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau melaksanakan penyerahan barang tertentu
- d. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

4. Perjanjian Tanggung Menanggung

Perjanjian ini adalah di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal seberapa orang terdapat di pihak debitur, maka pihak debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Ketentuan ini tercantum dalam pasal 1278 KUHPdata: suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditor, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu

²³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, h. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan debitor meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditor tadi.

5. Perjanjian Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Perjanjian yang seperti ini adalah perjanjian yang prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya suatu prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang bersangkutan di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perjanjian itu.

Perjanjian ini diatur dalam pasal 1296 KUHPerdara: suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan. Pasal 1297 KUHPerdara:

Suatu perikatan adalah tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang dimaksudkan karena sifatnya, dapat dibagi-bagi jika barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya perikatan tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan demi sebagian.

6. Perjanjian dengan Ancaman Hukuman

Pasal 1304 KUHPerdara memberikan definisi perikatan dengan ancaman hukuman sebagai suatu perikatan yang menempatkan seorang, sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan untuk melakukan sesuatu, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olehnya. Dengan rumusan tersebut, KUHPerdata tidak membatasi jenis hukuman yang dapat dikenakan, melainkan hanya dengan menyatakan bahwa debitur yang lalai dapat dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.²⁴

Perjanjian ini adalah suatu perjanjian di mana ditentukan bahwa si berpiutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁵ Adapun asas hukum perjanjian sebagai landasan pemikiran dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu:

²⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, h. 183.

²⁵Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas Konsensualitas

Dalam perjanjian, hal utama yang harus ditonjolkan ialah bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.²⁶

Asas ini mempunyai arti terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan perkata lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.²⁷

Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata yang tidak memerlukan formalitas, maka untuk melindungi kepentingan yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi di adakanlah bentuk formalitas.²⁸

²⁶ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 5

²⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, h. 15.

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34-35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas konsensualitas adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual. Sebagai pengecualian dikenal perjanjian formil dan perjanjian rill, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian yang disebut terakhir ini, kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.²⁹

2. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini, dipandang sebagai suatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup hanya dimungkinkan antara lain bilamana seseorang dapat mempercayai kata-kata orang lain.³⁰

Janji terhadap kata yang diucapkan sendiri adalah mengikat. Persetujuan ini pada hakikatnya diletakkan oleh para pihak itu sendiri di

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, h. 36-39.

³⁰ Herlien Budiono, h. 67, *Lihat di : Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas pundak masing-masing dan menetapkan ruang lingkup dan dampaknya.³¹ Suatu prestasi untuk melaksanakan suatu kewajiban selalu memiliki dua unsur penting. Pertama berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitur (schuld). Kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa debiturnya (haftung).

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam pasal 1339 KUHPdata: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal 6yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Asas ini membuat para pihak diperkenankan untuk membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendaknya. Selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan itu tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.³²

Asas ini memperbolehkan setiap orang untuk membuat

³¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 97.

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja bahkan diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.³³

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 KUHPdata: pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari pengertian tersebut perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.³⁴

Secara spesifik pasal tersebut menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh perorangan sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.³⁵

³³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014, Cet. Ke-4.), h. 22.

³⁴ Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 250

³⁵ Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, h. 250.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikatkan-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain.

Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang lain atau pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.³⁶

5. Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara: perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Peraturan yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.³⁷

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:³⁸

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung

³⁶Subekti, h. 30, lihat di: Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, h. 22.

³⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1992), h. 56-62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dan menanggung resiko.

- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam hubungan hukum itu. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

4. Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan kedua belah pihak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai dengan itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tercantum dalam pasal 1321 KUHPerdara : tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:³⁹

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Menurut Subekti menyatakan bahwa perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran menerima yang tertulis dalam surat tersebut, maka dengan ini seketika dapat dianggap sebagai lahirnya kesepakatan.⁴⁰

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan yang mengatur tentang kecakapan tercantum dalam pasal 1329 KUHPerdara: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap.

Adanya objek perjanjian yang harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang diperjanjian hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Ketentuan yang mengatur tentang suatu hal tertentu tercantum dalam pasal 1332 KUHPerdara: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Suatu perjanjian memang seharusnya berisi

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1987), h. 7.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 30.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pokok atau objek yang tertentu agar dapat dilaksanakan. Adanya klausula halal atau sebab halal tercantum dalam pasal 1335 KUHPerdata: suatu sebab halal adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

5. Akibat Hukum Perjanjian Dalam Bisnis

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:⁴¹

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith).
3. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur.

Namun perjanjian yang tidak memenuhi keabsahan, maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertama yang terdiri dari syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan kedua yang terdiri dari syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak

⁴¹Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, h. 109.



yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.⁴²

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.⁴³

Kepentingan perjanjian atau kontrak dalam bisnis diantaranya yaitu:⁴⁴

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum
4. Kontrak memberikan kepastian hukum
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif.

Dalam dunia bisnis terdapat perjanjian antar pelaku usaha yang menggunakan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Menurut Munir Fuady, MoU adalah perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya

⁴²Hasanudin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8.

⁴³Hasanudin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, h. 8.

⁴⁴Syaifuddin, h. 7. Lihat juga di Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 241.



secara detail, karena itu memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja, adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain.⁴⁵

Menurut Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian di antara pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.⁴⁶ Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangannya, yaitu:

1. MoU hanyalah merupakan suatu gentlemen agreement adalah kekuatan mengikatnya suatu MoU tidak sama dengan perjanjian biasa sekalipun dalam bentuk yang paling kuat, seperti akta notaris. MoU hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak enforceable secara hukum dan pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat ke pengadilan.
2. Perjanjian dibuat apapun bentuknya lisan atau tulisan, pendek atau panjang, lengkap atau pokok-pokoknya saja, ini tetap merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum telah bisa diterapkan.

⁴⁵Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 91.

⁴⁶Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), h. 4.



B. Perjanjian yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Perjanjian yang Dilarang

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku bisnis dan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat itu dijabarkan di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Anti monopoli, yaitu mengenai larangan perilaku-pelaku usaha yang dapat mendistorsi pasar dan atau yang dapat mengakibatkan praktik monopoli.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar. sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.⁴⁷

Pengertian perjanjian yang dilarang adalah suatu perbuatan dari satu atau pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat.

⁴⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mengenai apa yang dimaksud dengan kata perjanjian ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya.⁴⁸

Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian yang dilarang pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan mengikatkan diri atau kolusi, baik formal maupun informal di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terbentuk semacam koordinasi yang mengatur harga, kuota, dan/atau alokasi pasar. Praktek perjanjian terlarang terjadi apabila pelaku usaha.⁴⁹

1. Melalui perjanjian penetapan harga dengan para pelaku usaha sejenis berupaya mempengaruhi kenaikan, atau menghambat penurunan, harga produk yang mereka hasilkan dan/atau pasarkan;
2. Melalui perjanjian kuota produksi atau pengendalian keluaran (out-put lainnya dengan para pelaku usaha sejenis berupaya mengendalikan harga produk yang mereka hasilkan dan/atau pasarkan;
3. Melalui perjanjian pembagian daerah pemasaran dengan para pelaku usaha sejenis berupaya mengendalikan harga produk yang mereka hasilkan dan/atau pasarkan;

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 51

⁴⁹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, h. 166

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melalui perjanjian pembagian pangsa pasar dengan para pelaku usaha sejenis berupaya mengendalikan harga produk yang mereka hasilkan dan/atau pasarkan;
5. Melalui perjanjian pembentukan agen penjualan bersama dengan para pelaku usaha sejenis berupaya mengendalikan harga produk yang mereka hasilkan dan atau pasarkan; dan
6. Melalui perjanjian pembagian laba dengan sekelompok para pelaku usaha sejenis berupaya mengendalikan harga produk yang mereka hasilkan dan/atau pasarkan.

Subjek dalam perjanjian ini dapat disebut dengan pelaku usaha, dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerangkan: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Secara umum, pelaku usaha dibatasi dengan:⁵⁰

1. Pelaku usaha tidak boleh membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang seharusnya menjadi pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi suatu barang dan/atau jasa;

⁵⁰ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaku usaha tidak boleh membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang seharusnya menjadi pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran suatu barang dan/atau jasa;
3. Pelaku usaha tidak boleh membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang seharusnya menjadi pesaing untuk mengkoordinasikan harga penawaran mereka dalam pengadaan barang dan atau jasa atau kontrak proyek.

Dalam konteks persaingan maka seluruh pelaku usaha akan berupaya mencapai keuntungan maksimum sesuai dengan pilihan konsumen dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pelaku usaha akan memperhitungkan bahan baku, biaya harga, dan menentukan jumlah *output* sesuai dengan perhitungan keuntungan maksimum. Bila pelaku usaha bersama-sama setuju untuk menentukan harga dan output maka kelompok mereka akan bertindak sebagaimana seorang monopoli. Pasar akan menghadapi kendala karena jumlah output dibatasi, sementara kebutuhan dan permintaan konsumen lebih besar dari output. Harga menjadi lebih tinggi, karena telah ditetapkan bersama, dan mereka juga tidak menghadapi persaingan yang berarti.⁵¹

2. Bentuk Perjanjian Harga

Pengaturan harga dilarang karena praktik ini bersifat anti persaingan. Pengaturan harga pada dasarnya merupakan intervensi terhadap pembentukan harga yang seharusnya dihasilkan oleh mekanisme pasar yang wajar. Bentuk

⁵¹ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan harga yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Penetapan Harga di Pelaku Usaha

Peraturan dilarangnya pelaku usaha menerapkan harga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pelaku usaha yang bersaing di pasar yang sama untuk menaikkan atau menetapkan harga dengan tujuan membatasi persaingan di antara mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal dua pihak membuat perjanjian untuk secara bersama-sama menentukan harga jual barang yang akan secara bersama-sama menentukan harga jual barang yang akan dijual di dalam perjanjian yang dapat dilakukan dengan tertulis ataupun lisan.⁵²

Cara dalam menentukan harga salah satunya adalah dengan membuat pengumuman atau artikel di media massa yang mengindikasikan bahwa perlu kenaikan harga, sehingga pelaku usaha lainnya tahu bahwa mereka harus ikut menaikkan harga. Hal ini merupakan bentuk kolusi yang disamarkan (tacit collusion).⁵³

⁵² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 144

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 145



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian penetapan harga yang bersifat terbuka maupun yang disamakan pada dasarnya merupakan tindakan yang mencederai asas persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia.

b. Diskriminasi Harga

Aturan dilarangnya pelaku usaha melakukan diskriminasi harga diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

Diskriminasi harga adalah penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda dari harga kepada konsumen lain di dalam segmen pasar yang berbeda atas suatu barang dan/atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi. Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Dengan jalan memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau jasa yang sama.

Secara teknis deskirmanasi harga baru dapat dikatakan layak dilarang undang-undang, apabila terdapat perbedaan harga bagi konsumen yang satu dengan konsumen lainnya yang pada pokoknya bukan merupakan refleksi dari perbedaan biaya margin yang dikeluarkan oleh pihak penjual tersebut. Dalam melarang diskriminasi harga,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setidaknya hukum anti monopoli harus secara bijak mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁴

1. Kesamaan biaya produksi
2. Kesamaan kualitas dan kuantitas barang yang dijual
3. Kesamaan cost untuk memproduksi, menjual, dan delivery
4. Tidak ada perubahan harga karena perubahan atau perbedaan waktu
5. Aktifitas pemasaran dari barang tersebut harus sama
6. Komponen harga yang berbeda, termasuk juga jika ada tunjangan, bonus, atau kemudahan/jasa dari penjual yang diberikan berbeda-beda kepada satu pembeli dengan pembeli yang lain.

Dalam konsepsi hukum anti monopoli terdapat beberapa diskriminasi harga yang dilarang, yaitu sebagai berikut;⁵⁵

1. Diskriminasi harga primer adalah suatu diskriminasi yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya
2. Diskriminasi harga sekunder adalah suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mempunyai akibat negatif terhadap para konsumen dari pelaku usaha pesaingnya.
3. Diskriminasi harga langsung adalah suatu diskriminasi harga yang diberikan oleh seorang penjual kepada para pembeli di mana kelihatan

⁵⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 86

⁵⁵ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari harganya secara nominal memang berbeda terhadap satu pembeli dengan pembeli lainnya.

c. Penetapan Harga di bawah Pasar

Peraturan dilarangnya pelaku usaha menetapkan harga diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga di bawah pasar adalah suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan pesaingnya di suatu pasar dengan cara menetapkan harga penjualan yang rendah, di bawah harga variabel.

Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan melakukan perjanjian yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah harga pasar atau yang dikenal istilah praktek antidumping ini dimaksudkan agar pihak pesaingnya dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku, padahal kualitas serta harga barang/jasanya sesuai dengan harga pasar.⁵⁶

d. Penetapan Harga Jual Kembali

Aturan yang melarang pengaturan harga jual kembali diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: pelaku usaha dilarang

⁵⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga jual kembali adalah kesepakatan antara pemasok dan distributor tentang pemasokan barang dan/atau jasa tertentu yang didasarkan pada kondisi kesepakatan bahwa pihak distributor akan menjual pada harga yang ditetapkan atau didiktekan oleh pihak pemasok.

3. Perjanjian Penetapan Harga⁵⁷

Untuk mengantarkan perjanjian penetapan harga, Peneliti terlebih dahulu menggambarkan strategi penetapan harga yang digunakan oleh produsen atau pelaku usaha, baik untuk menarik minat konsumen, memaksimalkan laba, maupun untuk merebut pasar dari pesaing lainnya, dengan melihat gambaran apa yang melandasi tingkah laku produsen dalam penetapan harga dan bagaimana penerapannya masing-masing strategi yang dipilih, yaitu:

1. Pasar

Pasar⁵⁸, sebagai tempat untuk bergerakanya roda ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaku usaha baik sebagai produsen,

⁵⁷ Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. William J. Stanton, *Fundamentals of Marketing*, (Kogakusha: Mc. Graw-Hill Book Company, 1978), h. 246-247. Lihat di: Basu Swastha Dh, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Cet. Ke-12, h. 241

⁵⁸ Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distributor, maupun konsumen merupakan salah satu pihak yang memiliki peran terbesar dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu pasar. Pasar yang terdistorsi mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran yang riil, di mana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Ini merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, akibatnya fatal, yaitu dapat melumpuhkan perekonomian salah satu pelaku usaha, masyarakat luas, bahkan yang terbesar dapat melumpuhkan suatu negara.⁵⁹

Melalui penetapan pasar bersangkutan, dapat diperoleh informasi serta ukuran yang jelas mengenai pasar, pelaku usaha yang terlibat, serta dampak anti persaingan dari setiap dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Pendefinisian pasar merupakan bagian penting dari upaya pembuktian dugaan pelanggaran. Untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai struktur pasar setiap produk oleh suatu pelaku usaha. Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasal 1 angka 10 menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikategorikan dalam dua perspektif yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk.⁶⁰

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, h. 122

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, h. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, untuk dapat memahami pasar perlu dimengerti bahwa terdapat dua pihak yang selalu terlibat dalam setiap transaksi suatu pasar, yakni pembeli dan penjual atau konsumen dan produsen. Hasil akhir atau harga umumnya sangat tergantung dan kekuatan relatif yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kekuatan yang dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam suatu pasar tergantung atau dibatasi oleh tiga bentuk persaingan, yakni⁶¹ persaingan antara konsumen, persaingan antar konsumen dan produsen, persaingan antar produsen.

2. Perjanjian penetapan harga

Penetapan harga yang dapat menetapkan harga yang mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan pada strategi penetapan harga, dimana produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen. Terdapat beberapa strategi penetapan harga yang dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi, akan tetapi strategi ini dapat merusak persaingan usaha, yaitu:⁶²

- a. Menyerap surplus dari konsumen dimana strategi penetapan harga yang bertujuan mendorong maksimalisasi laba pada kelompok pasar monopoli dan oligopoli. Untuk mencapai maksimalisasi laba, produsen akan menarik sebanyak consumer's surplus dari konsumen.

⁶¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, h. 125

⁶² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, h. 127-128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok ini terdiri atas diskriminasi harga, dua bagian tarif, dan penggabungan dua komoditas dalam satu harga (*commodity bundling*).

- b. Diskriminasi harga yang menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen atau kelompok konsumen.

Dari uraian strategi tersebut, maka perjanjian penetapan harga ini dilarang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme harga yang adil pada suatu pasar yang bersaing, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi usaha-usaha yang mengganggu terjadinya suatu keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle, sebab harga pasar yang bersaing merupakan kecenderungan yang wajar.

Penetapan harga antara pelaku usaha dilarang, sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha dapat mengakibatkan tidak berlaku hukum pasar yang baik mengenai harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran.

Perjanjian penetapan harga bersama-sama merupakan sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam pengaturan hukum persaingan usaha. Hal tersebut disebabkan bahwa penetapan harga selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Perjanjian penentuan harga, baik yang bersifat terbuka maupun disamarkan, pada dasarnya merupakan tindakan yang mencederai asas persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia. Itu sebabnya dalam penentuan harga apapun bentuknya pada dasarnya dilarang. Akan tetapi dalam beberapa kasus, ada beberapa penentuan harga yang tidak dilarang oleh hukum, yaitu penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah.

Penetapan harga dapat dilakukan dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk menaikkan harga yang disebut dengan (*price signaling*) dan juga dengan membuat pengumuman di media massa yang mengidentifikasikan bahwa perlu kenaikan harga yang disebut (*tacit collusion*). Perjanjian penetapan harga dapat dilakukan secara terbuka ataupun disamarkan yang pada dasarnya mencederai asas persaingan. Hal ini karena perjanjian penetapan harga akan menjadikan harga lebih tinggi, bukan harga pasar sehingga tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang tersedia sedikit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: ketentuan larangan penetapan harga yang dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku atau dikecualikan bagi:

1. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan
2. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

4. Pembuktian Penetapan Harga

Kata pembuktian berasal dari kata bukti yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yaitu evidence dan proof. Evidence memiliki makna informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu adalah benar. Sedangkan proof mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap evidence atau dapat juga dipergunakan lebih luas mengacu pada proses itu sendiri.

Karenanya evidence lebih dekat maknanya kepada alat bukti sedangkan proof dapat diartikan pembuktian yang mengarah pada suatu proses. Oleh sebab itu, bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses mengenai pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti sampai dengan penyampaian bukti tersebut kepada pengadilan.

Di dalam memeriksa pelaku usaha ataupun saksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU)²⁴ memerlukan bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat bukti ada di dalam Hukum Acara Perdata, tetapi mirip dengan alat-alat bukti yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum di dalam Hukum Acara Pidana. Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan alat bukti pemeriksaan. yaitu:

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, maka tidak setiap orang yang menjadi saksi dapat didengar keterangannya. Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:

- a. Keluarga sedarah/semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terlapor dan atau pelapor
- b. Isteri atau suami dari terlapor meskipun sudah bercerai
- c. Anak belum berusia 17 tahun
- d. Orang sakit ingatan.

2. Keterangan Ahli

Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan memberikan keterangan pendapat guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 75 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa orang yang dapat menjadi ahli haruslah orang yang memenuhi syarat memiliki keahlian khusus yang dibuktikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sertifikat atau memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya. Jadi, tidak setiap orang dapat menjadi ahli guna memberikan keterangan/pendapat dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, dan tidak mempunyai keahlian khusus atau memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya dalam bidang praktik monopoli dan persaingan usaha.

3. Surat dan atau Dokumen

Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima KPPU. Majelis Komisi kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif, oleh karena itu dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus.

Pasal 76 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 menentukan surat atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, yaitu:

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang .membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sabagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Data yang memuat mengenai kegiatan usaha terlapor, antara lain data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan;
- e. Surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan perkara;
- f. Atas permintaan, Majelis Komisi dapat menyatakan data sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam pemeriksaan.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Petunjuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti asalkan sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keterangan Pelaku Usaha

Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada KPPU mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, baik yang melakukan tuntutan ganti rugi maupun tidak. Terlapor adalah pelaku dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Keterangan terlapor tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka pembuktian adanya perjanjian di antara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan/atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (concerted). Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.

Mengenai bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, memberikan arti bukti langsung (hard evidence) adalah bukti yang dapat diamati (observable elements) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. bukti langsung dapat berupa bukti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti lainnya.

Adapun bukti tidak langsung (circumstantial evidence) adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa:

1. Bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan)
2. Bukti ekonomi

Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun-1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapula analisis tambahan (plus factor) yang merupakan analisis ekonomi yang diperlukan untuk:

1. Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun tanpa adanya kolusi.
2. Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu kolusi.
3. Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas kolusi.
4. Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas perjanjian penetapan harga.
5. Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa poin yang menjadi sebuah kesimpulan:

1. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa visa umrah gratis dan tidak berbayar. Adapun biaya visa yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa haji dan umrah yang menentukan harganya. Biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terdaftar sebagai provider visa umrah merupakan biaya pengurusan untuk penerbitan visa umrah di Kedutaan Besar Arab Saudi.

Adapun besaran harga visa umrah di masing-masing provider visa umrah beragam jumlahnya, jumlah tersebut ditentukan dengan musim tertentu. Pada musim biasa yaitu dari bulan Muharram sampai dengan bulan Rajab harga visa umrah sekitar 60-100 USD, adapun pada musim Syaban sampai dengan bulan Ramadhan harga visa umrah bisa menyentuh di harga 200 USD.

2. Harga rekomendasi visa umrah yang tertera dalam Surat Edaran No 005/DP/HIMPUH/P.VISA/XI/2018 telah dicabut dihadapan rapat pengurus dan anggota provider visa umrah. Harga rekomendasi merupakan harga yang tidak ada unsur paksaan yang mengikat kepada anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji. Rekomendasi harga ini bukan penetapan harga jadi tidak ada unsur penetapan harga, sehingga provider visa umrah bebas untuk menentukan harga visa. Namun, bila ditinjau dari hukum persaingan usaha bahwa pelaku usaha dilarang berjanji untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan nama apapun baik secara tertulis ataupun lisan.

Dengan adanya harga rekomendasi ini, menurut Peneliti akan mengakibatkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan alasan apabila para pelaku usaha di saat tawar menawar harga visa terdapat adanya unsur kesepakatan dan kepatuhan terhadap ketentuan harga rekomendasi visa haji dan umrah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan demi terciptanya suatu persaingan yang sehat kepada:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama untuk membuat payung hukum pengaturan provider visa umrah yang lebih melindungi kepada pelaku usaha di penyelenggara ibadah umrah agar mempunyai kepastian hukum.

Kepastian hukum bagi pelaku usaha dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia, sehingga pelaku usaha Indonesia bisa lebih bersaing di bisnis internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar dapat mencegah segala perjanjian- perjanjian atau kegiatan-kegiatan yang akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat di dunia usaha Indonesia, dengan cara lebih mensosialisasikan hukum persaingan usaha ke pelaku usaha besar, sedang atau pun kecil.

3. Himpunan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji agar sering-sering di tiap tahunnya untuk mengadakan sebuah event atau acara ke masyarakat untuk memperkenalkan penyelenggara umrah yang baik untuk dipilih oleh calon jamaah umrah, sehingga masyarakat tahu dan tidak tertipu dengan penyelenggara ibadah umrah yang tidak berizin.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Silondae, Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya diIndonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1997.
- _____, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005.
- Muhammad Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2008.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT,Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjia*, Jakarta, PT.Intersama, 2002.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, 2003.
- Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta, 2013

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1. Hasil Wawancara

Tempat : Kantor PT.Riau Wisata Hati dan PT.Silver Silk

Hari/Tanggal : Kamis / 26-September-2019 dan Senin / 30-September 2019

Waktu :

Oleh :

1 Apakah benar HIMPUH menetapkan harga visa umrah sebagaimana tercantum di www.kabarumrah haji.com ?

➤ Dalam surat edaran yang terdapat di media online itu, adalah harga rekomendasi bukan penetapan harga jadi tidak ada penetapan harga, harga rekomendasi itu tetap tetap menjadi kebebasan provider visa. Harga rekomendasi bukan suatu objek hukum dan tindakan hukum. Berbeda dengan menetapkan harga minimum dan maksimum. Surat edaran sudah dicabut. Dengan berita tersebut sudah disomasi oleh anggota ke pihak media online itu.

2 Apa bentuk surat tersebut ?

➤ Bentuk surat tersebut adalah surat edaran. Berbeda dengan surat keputusan penetapan harga itu pasti mengikat, kalau ini hanyalah surat edaran, isinya adalah harga rekomendasi dan harga rekomendasi itu tidak mengikat, bisa di pakai atau tidak.

3 Berapa harga visa umrah di Kedutaan Besar Arab Saudi ?

➤ Dari pihak Arab Saudi sendiri tidak menetapkan berapa kisaran harga nya, dengan arti nol rupiah, tidak membayar itu hanya bisnis. Provider visa umrah yang menentukan harganya, komponennya apa saja dari muasasah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provider visa umrah. Perhitungan harga visa hanya diketahui masing-masing provider visa umrah dan itu tidak menjadi objek ketetapan asosiasi. Dan yang tersebar di media online itu hanya rekomendasi yang memberi semacam arahan tapi tidak mengikat, bisa saja harga itu ditentukan harga di atas bisa harga di bawah tergantung antar provider visa umrah dan penyelenggara umrah.

4 Apakah asosiasi mengatur harga visa umrah ?

- Asosiasi tidak mengatur sama sekali, yang mengatur harga visa umrah itu hanya provider, asosiasi tidak membuat regulasi.

5 Apa fungsi HIMPUH dalam penyelenggaraan ibadah umrah ?

- Himpunan suatu wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama, baik bersifat regulasi, atau bersifat advokasi. Misalnya ada anggota yang melanggar atau disomasi atau diadukan. Asosiasi melihat apakah anggota tersebut sebagai korban atau pelaku. Ada tiga tugas wewenang HIMPUH yakni pelayanan, pembinaan dan perlindungan.

6 Apa perbedaan dengan himpunan yang lainnya ?

- Tidak ada perbedaan, itu hanya tergantung penyelenggaraan umrah saja memilih himpunan yang mana, tidak ada hambatan seseorang untuk berkumpul dan berserikat.

7 Apa manfaat HIMPUH bagi biro sebagai anggota ?

- Menerima pembinaan, pelayanan dan advokasi. Terdaftaranya penyelenggara umrah di himpunan dibebaskan, masuknya penyelenggara umrah tersebut ke himpunan atas dasar ingin adanya pembinaan, pelayanan



dan advokasi. Apabila kita sebagai penyelenggara ingin berdiri sendiri tetap di bebaskan.

8. Berapa jumlah anggota HIMPUH ?

HIMPUH beranggotakan 313 travel agen penyelenggara murah dan haji khusus dari seluruh Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA UMROH DI KOTA PEKANBARU (Studi pada PT. RAWH dan PT. Silver Silk)”, yang ditulis oleh:

Nama : AGIEL AL ASSYAFAR
NIM : 11327102668
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Basir, S.HI., MH

Penguji II
Firdaus, SH., MA

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan
Dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta
GEN
dan
ama
IM
rogi
dik
IN
ari A
rakt
emp
dip
h d
kau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AGIEL AL ASSYAFAR

NIM : 11327102668

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Harga Visa Umroh Di Kota Pekanbaru (Studi pada PT. RWH dan PT. Silver Silk)*

Pembimbing : Hellen Last Fitriyani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010



RIWAYAT HIDUP



AGIEL AL ASSYAFAR, Kelahiran Pekanbaru, 17 Juli 1995, anak ketiga dari empat bersaudara, yang lahir dari seorang Ibu bernama Welly Darty dan Ayah Yandri Aleska, Penulis memulai pendidikan SD Negeri 010 Senapelan di Tahun 2001 dan melanjutkan MTsS Al-Muslimun Seikijang Mati di Tahun 2007 selanjutnya SMAS Al-Muslimun Seikijang Mati di Tahun 2010, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia) Organisasi Eksternal bermula pada tahun 2013 aktif di Pengurus Wilayah hingga 2019 dan lanjut di kepengurusan Pusat (PB PII) hingga 2020 nanti, selama penulis menjalani pendidikan penulis pernah mendapat beasiswa Program Pertukaran Pelajar Antar Negara (Exchange Student Indonesia Thailand) pada tahun 2015 dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Internasional (KKN) di Pattani Thailand pada tahun 2016, tanggal 11 Mei 2017 penulis mengajukan judul penelitian skripsi hingga berkali-kali mengajukan kembali judul hingga pada awal 2019 penulis melaksanakan Ujian Proposal selanjutnya di tanggal 16 Maret 2020 penulis melaksanakan kompre pada tanggal 15 November 2019 dan penulis melanjutkan penelitian lapangan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENGENAI HARGA VISA DI KOTA PEKANBARU (STUDI PADA PT.RWH DAN PT. SILVER SILK”** dibawah bimbingan **Dosen Terbaik IBUK HELLEN LAST FITRIYANI** kemudian disetujui oleh pembimbing skripsi dan diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan Ujian Munaqasah pada hari Rabu, 16 Maret 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.